

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adam Chazawi, *kejahatan terhadap nyawa*.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, T Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amin, R. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Deepublish.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinek Cipta, Cet. Pertama, Jakarta.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinek Cipta, Cet. Pertama, Jakarta.

Bambang Waluyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Bulan Bintang.

Gunadi, I., & Efendi, J, hukum Pidana, kencana.

Ilyas, A., & Mustamin, M. *Asas-asas hukum pidana*. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D, *Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*. Nuansa Aulia.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, cetakan ke 2, sinar grafika, jakarta.

Moeljatno, S. H. *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.

Nasarudin umar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta aynat publishing.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Soerjono, S. Pengantar penelitian hukum. *Universitas Indonesia, Jakarta*.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL :

- Achmad, F. F., & Taun, T. (2022). *Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 7950-7958.
- Amin, R. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).
- Caecilia, D. F. R. (2015). Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 3(6).
- Eddyono, S. W. (2011). Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia: Perbandingan di Amerika dan Eropa. *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban*, 1(1).
- Mahmud, B, 2021. *Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 362-377.
- Mamahit, C. E. (2016). Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). *Lex Crimen*, 5(6).
- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Law Reform*, 12(1), 1-16.
- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Law Reform*, 12(1), 1-16.
- Rahawarin, F. (2015). Jurnal; Fenomena tindak pidana pedofilia dalam tinjauan yuridis. *FIKRATUNA*, 7(1), 21-40.
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.

- Sajidin, M., Fiaturrahman, M. I., & Asadillah, M. I. Z. (2021). Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2).
- Sanusi, A, 2016. Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Aspects Of Health Carestowards Convicts And Inmates). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1), 37-56.
- Siahaan, N., & Hakim, A, 2023. Pelaksanaan Asas Cabotage Terhadap Kapal Asing Yang Berlayar Di Perairan Indonesia. *Jurnal Autentik (Jurnal Hukum Dan Sosial Humaniora)*, 1(1), 52-57.

TESIS :

- Bahar, S. Z. (2018). *Analisis Yuridis Penataan Ulang Syarat Justice Collabolorator Dalam Tindak Pidana Narkotika* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Marisa Aulia, R. I. S. M. I. L. D. A. (2023). *Eksistensi Justice Collaborator Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Sema Ri No. 4 Tahun 2011* (Doctoral Dissertation, Universitas Mataram).
- Musta'in, C. H. O. I. R. U. L. (2017). *Tinjauan Hukum Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

SKRIPSI :

- Dheni, I. (2023). *Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Hendryan, R. *Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Peradilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus*

- Setya Novanto Ketua DPR RI Periode 2014-2019* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- IZUANDIRA, E. A. (2022). *Penolakan Justice Collaborator Mukti Sulaiman Dalam Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Murtadho, M, A, 2013. *Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Amerika Serikat, Jerman Dan Belanda* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Puspitasari, D. A. (2015). *Kajian Yuridis Tidak Dipenuhinya Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/puu-x/2012)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Suryamal, S, 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid. B/2019/Pn. Snj)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).

INTERNET :

- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/552166/pakar-hukum-pidana-jc-berlaku-bagi-semua-kasus-tindak-pidana>, Diakses: 12 Juli 2023.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/22/17043391/menurut-hakim-novanto-setengah-hati-ungkap-kasus-e-ktp>. Diakses 27 Juli 2023, Diakses : 22 Agustus 2023.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/14/15454861/polisi-tahan-irjen-napoleon-dan-tommy-sumardi>, Diakses : 21 Agustus 2023.
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/15065331/perjalanan-richard-eliezer-di-kasus-brigadir-j-jadi-tersangka-pertama-kini>, Diakses : 22 Agustus 2023.
- <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1613.pdf>, Diakses: 12 Juli 2023.

<https://www.liputan6.com/news/read/3193875/didakwa-2-pasal-korupsi-setyanovanto-terancam-20-tahun-bui>, Diakses : 21 Agustus 2023.

Indri Handayani. “1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian”. Dalam <https://indri.ilearning.me/1-3-ruang-lingkup-penelitian>. Diakses: 11 januari 2023.

Muhammad Taufiq, Justice Collaborator <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/05/10/justice-collaborator/>, Diakses: 2 juli 2023.

Santi Andriani, Landasan justice-collaborator <https://www.inilah.com/enam-landasan-justice-collaborator>, Diakses 12 Juli 2023.

Seputar Indonesia, 11 Mei 2012 Hal 8

KEPUTUSAN PENGADILAN :

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1f441d06410eb4b5313033363334.html>, Diakses : 21 Agustus 2023.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d22cbd673d4425ca4b6cd0b11c918322.html>, Diakses : 22 Agustus 2023.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jakarta-selatan/kategori/pembunuhan-1.html>, Diakses : 23 Agustus 2023.

UNDANG-UNDANG :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 2006 *meratifikasi United Nations Convention Against Corruption* *Konvensi PBB Anti Korups.*

Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 10A.

Undang-Undang RI. Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006. Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kutipan Penjelasan Umum Atas.